

KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi (BKD dan PSDM) Kabupaten Boven Digoel adalah perwujudan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Eukitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel berisi informasi mengenai laporan keuangan yang bermanfaat antara lain untuk :

1. Menjadi pendukung laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
2. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;
3. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
4. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun sebagai wujud akuntabilitas BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas – tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 dan 2016;
2. Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016;
3. Laporan Operasional Tahun 2017;
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017;
5. Catatan atas Laporan Keuangan

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami sebagai Pengguna Anggaran.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah Merah, 1 Januari 2018

KEPALA BKD DAN PSDM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



AFRINSIALOYSIUS, S.Sos
NIP. 19580630 198608 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

LAPORAN OPERASIONAL 2017

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penulisan catatan laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V Rincian pos - pos laporan Keuangan

5.1 Penjelasan pos - pos Laporan Realisasi Anggaran

Bab VI Penjelasan atas informasi - informasi non - keuangan

Bab VII Penutup

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

- Buku Kas Umum
- Register Penutupan Kas
- Berita Acara Pemeriksaan Kas
- Rekening Koran
- Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Persediaan
- Kartu Inventaris Barang (KIB)



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Trans Papua – Tanah Merah Telp (0975).. Fax (0975)..

TANAH MERAH

Kode Pos : 99663

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		TA 2017	TA 2017		TA 2016
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	00,00	0,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	00,00	0,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00	00,00	0,00
6	Lain - lain PAD yang Sah	0,00	0,00	00,00	0,00
7	Jumlah PAD (3 s/d 6)	0,00	0,00	00,00	0,00
8	TOTAL PENDAPATAN	0,00	0,00	00,00	0,00
9	BELANJA	15.205.941.371,00	11.907.783.190,00	78,31	14.695.848.576,00
10	BELANJA OPERASI	14.326.645.871,00	11.105.537.590,00	77,52	13.787.539.576,00
11	Belanja Pegawai	4.504.498.871,00	3.434.632.601,00	76,25	3.369.218.954,00
12	Belanja Barang	9.822.147.000,00	7.670.904.989,00	78,10	10.418.329.622,00
13	Jumlah Belanja Operasi (11 +12)	14.326.645.871,00	11.105.537.590,00	77,52	13.787.539.576,00
14	BELANJA MODAL	879.295.500,00	802.245.600,00	91,24	908.309.000,00
15	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Peralatan dan Mesin	854.295.500,00	777.295.600,00	90,99	908.309.000,00
17	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.000.000,00	24.950.000,00	99,80	0,00
19	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Belanja Modal (15 s/d 20)	879.295.500,00	802.245.600,00	91,24	908.309.000,00
22	TOTAL BELANJA (13 + 21)	15.205.941.371,00	11.907.783.190,00	78,31	14.695.848.576,00
23	SURPLUS/ DEFISIT (8 – 22)	(15.205.941.371,00)	11.907.783.190,00	78,31	(14.695.848.576,00)
24	SiLPA (SiKPA)		3.298.158.181,00	21,69	4.852.282.024,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Trans Papua – Tanah Merah Telp (0975).. Fax (0975)..

TANAH MERAH

Kode Pos : 99663

NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
6	Piutang Pajak	0,00	0,00
7	Piutang Restribusi	0,00	0,00
8	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00
9	Piutang Lain – lain	0,00	0,00
10	Persediaan	6.638.200,00	5.308.500,00
11	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 10)	6.638.200,00	5.308.500,00
12	ASET TETAP		
13	Tanah	0,00	0,00
14	Peralatan dan Mesin	777.295.600,00	908.309.000,00
15	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
16	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24.950.000,00	0,00
17	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
18	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
19	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
20	Jumlah Aset Tetap (13 s/d 19)	802.245.600,00	908.309.000,00
21	ASET LAINNYA	0,00	0,00
22	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
23	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
24	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
25	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
26	Aset Lain – lain	0,00	0,00
27	Kas Bendahara Pengeluaran yang Belum Dipertanggungjawabkan	3.177.592.665,00	3.177.592.665,00
28	Aset Tetap yang Dihilangkan	0,00	0,00
29	Jumlah Aset Lainnya (22 s/d 28)	3.177.592.665,00	3.177.592.665,00
30	JUMLAH ASET (11+20+29)	3.986.476.465,00	4.091.210.165,00
31	KEWAJIBAN		
32	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
33	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
34	Hutang Bunga	0,00	0,00
35	Hutang Pajak	0,00	0,00
36	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
37	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
38	Jumlah Kewajiban (33 s/d 37)	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
39	EKUITAS DANA		
40	EKUITAS DANA LANCAR		
41	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran, SiLPA/ (SiKPA)	3.298.158.181,00	4.503.532.024,00
42	Cadangan Piutang	0,00	0,00
43	Cadangan Persediaan	0,00	0,00
44	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
45	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
46	Cadangan Asuransi Dibayar Dimuka	0,00	0,00
47	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (41 s/d 46)	3.298.158.181,00	4.503.532.024,00
48	EKUITAS DANA INVESTASI		
49	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
50	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0,00	0,00
51	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0,00	0,00
52	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (48 s.d 50)	0,00	0,00
53	EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI	0,00	0,00
54	R/K PPKD	0,00	0,00
55	Jumlah Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi (54)	0,00	0,00
56	Jumlah Ekuitas Dana (47+ 52 + 55)	3.298.158.181,00	4.503.532.024,00
57	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+56)	3.298.158.181,00	4.503.532.024,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Trans Papua – Tanah Merah Telp (0975).. Fax (0975)..

TANAH MERAH

Kode Pos : 99663

LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Saldo 2017 (Rp.)	Saldo 2016 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	Trend (%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN – LO	0,00	0,00	0,00	00,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	0,00	0,00	0,00	00,00
3	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	00,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	00,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	00,00
6	Lain-lain PA D Sah – LO	0,00	0,00	0,00	00,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO (3 s/d 6)	0,00	0,00	0,00	00,00
8	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	00,00
9	BEBAN	11.105.537.590,00	14.043.183.310,00	(2.937.645.720,00)	(20,92)
10	BEBAN OPERASI	11.105.537.590,00	14.043.183.310,00	(2.937.645.720,00)	(20,92)
11	Beban Pegawai – LO	3.117.432.601,00	3.369.218.954,00	(251.786.353,00)	(7,47)
12	Beban Barang dan Jasa	7.988.104.989,00	10.512.012.122,00	(2.523.907.133,00)	(24,01)
13	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	161.952.234,00	(161.952.234,00)	(100,00)
18	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Lain – lain	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Beban Operasi (11 s/d 19)	11.105.537.590,00	14.043.183.310,00	(2.937.645.720,00)	(20,92)
21	SURPLUS / DEFISIT – LO (8 – 20)	(11.105.537.590,00)	(14.043.183.310,00)	2.937.645.720,00	(20,92)



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Trans Papua – Tanah Merah Telp (0975).. Fax (0975)..

TANAH MERAH

Kode Pos : 99663

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
1.	EKUITAS AWAL	1.101.533.760,00	330.309.328,00
2.	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(11.105.537.590,00)	(14.043.183.310,00)
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :		
	<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>	0,00	0,00
	<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i>	0,00	0,00
	<i>Koreksi ekuitas lainnya</i>	0,00	0,00
	<i>Koreksi ekuitas ak. Penye. Peralatan dan mesin</i>	0,00	(368.987.296,00)
	<i>Koreksi ekuitas ak. Penye. Gedung dan bangunan</i>	0,00	0,00
	<i>Koreksi ekuitas ak. Penye. Jalan, irigasi dan jaringan</i>	0,00	389.792,00
	<i>Koreksi ekuitas pengakuan utang</i>	0,00	0,00
	<i>Koreksi ekuitas aset tetap</i>	0,00	486.670.623,00
	<i>Koreksi ekuitas aset tetap lainnya</i>	0,00	0,00
4.	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	11.907.783.190,00	14.695.734.623,00
5.	EKUITAS AKHIR	1.903.779.360,00	1.101.533.760,00

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan OPD

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan OPD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- f) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.
- g) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

Sedangkan tujuan umum laporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan OPD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2017 yang disusun oleh BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel telah menyediakan informasi mengenai : aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan belanja.

1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BKD dan PSDM Tahun Anggaran 2017 disusun dengan berlandaskan pada :

- 1) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua;

- 2) Undang – Undang Nomor **26** Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, **Kabupaten Boven Digoel**, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
- 3) Undang – Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 6) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 03 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasirs Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- 13) Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2017 tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017;
- 16) Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD-P Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017.
- 17) Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Susunan Organisasi, Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja BKD dan PSDM.

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan beberapa modifikasi, yaitu dengan format sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.4 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.5 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.6 Sistematika penulisan catatan laporan keuangan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.4 Ekonomi Makro
 - 2.5 Kebijakan Keuangan
 - 2.6 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah.
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan.
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.
- Bab V Rincian pos – pos laporan Keuangan
- Bab VI Penjelasan atas informasi – informasi non – keuangan
- Bab VII Penutup

BAB. II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

2.1 Ekonomi Makro

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 secara normatif dilakukan dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip – prinsip anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat hal ini ditekankan baik dalam penyusunan APBD sampai dengan perubahan APBD.

Kebijakan yang diambil tidak terlepas dari kondisi umum sosial ekonomi, sosial budaya, serta kondisi fisik dan prasarana kabupaten. Secara umum, pertumbuhan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Boven Digoel yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sangat mendukung upaya pencapaian target yang telah direncanakan melalui perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Namun demikian kondisi ini belum cukup mencerminkan tingkat pemerataan kesejahteraan, sehingga kebijakan pembangunan yang ditekankan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 diupayakan mampu mengurangi dan mengatasi permasalahan yang terdapat di Kabupaten Boven Digoel. Melalui Program kegiatan yang telah ditetapkan oleh BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dituangkan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karenanya dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pendapatan Belanja Daerah difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kondisi yang aman, damai, demokratis dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan berdasarkan rencana strategi yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Dari keseluruhan program dan kegiatan BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel TA. 2017 mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar **Rp. 15.205.941.371,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 11.907.783.190,00** sebagian besar/ secara akumulasi telah terlaksana dengan capaian rata rata **78,31 %** dari target yang ditetapkan. Efisiensi biaya yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017 sebesar **Rp. 3.298.158.181,00** atau sebesar **21,69%**, disisi lain terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala/ hambatan diantaranya waktu, karakteristik dan kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

Berdasarkan kebijakan yang telah ditempuh oleh BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel pada Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar **Rp. 15.205.941.371,00 (lima belas milyar dua ratus lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 11.907.783.190,00 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu serratus sembiah puluh rupiah)**, atau sebesar **78,31 %** yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
			Angg	Total
Belanja Operasi	14.326.645.871,00	11.105.537.590,00	77,52	73,03
Belanja Modal	879.295.500,00	802.245.600,00	91,24	5,28
Jumlah	15.205.941.371,00	11.907.783.190,00	78,31	21,69

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Waktu, durasi pelaksanaan kegiatan dan jadwal penetapan anggaran tidak memungkinkan untuk dapat dilaksanakannya suatu kegiatan pada awal tahun anggaran sehingga kegiatan menumpuk pada triwulan akhir.
- Terdapat program dan kegiatan yang perlu disesuaikan dengan durasi waktu/ jadwal pihak penyelenggara baik Pemerintah Provinsi dan Pusat sehingga apabila tidak dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran;
- Karakteristik kegiatan yang bersifat fisik (berkaitan dengan ketersediaan barang, sistem dan waktu).
- Kondisi alam yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi.

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah Unit Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kabupaten Boven Digoel, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan identitas sebagai berikut :

- Nama Entitas Akuntansi : BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel
- Alamat : Jl. Trans Papua Arah Tanah Merah - Mindiptana
- Kepala OPD : **AFRINSI ALOYSIUS, S.Sos**

Sebagai entitas akuntansi, BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel memiliki struktur Organisasi Penata Usahaan Keuangan yang meliputi :

1. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- Menyusun Rencana Kerja (RKA).
- Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan Anggaran OPD yang dipimpinnya.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Mengusulkan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dan bendahara pengeluaran/ bendahara penerima kepada Bupati melalui BPKAD.
- Apabila pengguna anggaran/ pengguna barang berhalangan sementara, mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pejabat Sementara yang diberi kewenangan sebagaimana pengguna anggaran/ pengguna barang termasuk penandatanganan SPM dan tugas – tugas lain dalam pengelolaan keuangan OPD.

2. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - Menandatangani SPM – LS dan SPM – TU.
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - Melaksanakan tugas – tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan pejabat pengguna anggaran.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Tugas Pokok dan Fungsi :
- Menyusun Rencana Kegiatan Kerja.
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Bertanggungjawab atas pencapaian target, sasaran, kegiatan yang dikendalikannya.
 - Menyusun Rencana Jadwal pelaksanaan kegiatan dan dikoordinasikan dengan panitia pengadaan.
 - Meneliti dan mengoreksi dokumen – dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/ kerjasama, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran dan dokumen kegiatan lainnya) yang akan dimintakan tanda tangan pengguna anggaran/ pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
 - Menyiapkan penetapan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Menyiapkan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa.
 - PPTK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan.
 - Melaporkan Pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pengguna anggaran/ pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan – Organisasi Perangkat Daerah (PPK – OPD)
- Tugas Pokok dan Fungsi :
- Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
 - Meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU dan SPP – TU serta SPP – LS yang diajukan bendahara pengeluaran.
 - Menyiapkan SPM.
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
 - Melakukan verifikasi SPP.

- Melaksanakan akuntansi OPD.
- Menyiapkan laporan keuangan OPD.
- Menyiapkan pengesahan SPJ.
- Menyiapkan Laporan realisasi barang/ aset OPD.

5. Bendahara Penerimaan.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD yang bersangkutan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara penerima dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

6. Bendahara Pengeluaran.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD yang bersangkutan.
- Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dapat dibantu oleh kasir pengeluaran/ penyimpanan uang, pembuat dokumen, pencatat pembukuan, pembuat daftar gaji dan pembuat laporan gaji yang ditetapkan kepala OPD.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasar Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel adalah : Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/ asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,

bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- 4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan.
Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor **03 Tahun 2016** tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2016 telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor **03 Tahun 2016** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah:
1. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA OPD
Pencatatan transaksi atas Pendapatan – LO dilakukan dengan memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Pengakuan pendapatan – LO ini didasarkan pada dokumen akuntansi/ Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK OPD sesuai dokumen sumber yang diterima
 - a. Pendapatan – LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan – LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima
 - b. Pendapatan – LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dan masih dalam periode pelaporan, dimana penetapan hak pendapatan dapat dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima
 - c. Pendapatan – LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum

menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu Pendapatan – LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi hak Pemerintah Daerah

2. Akuntansi Beban dan Belanja OPD

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK OPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas beban di OPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini :

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewati tanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana timbulnya kewajiban daerah terjadi lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi penetapan/ pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.

b. Beban diakui pada saat pengeluaran kas

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat pengeluaran kas, pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran.

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah (pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca).

3. Kuntansi Piutang OPD

Ketika OPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/ retribusi atau pihak ketiga lainnya, maka PPK – OPD akan mengakui adanya piutang akibat transaksi tersebut dengan mencatat “piutang” pada sisi debit dan “pendapatan...(sesuai rincian objek)” pada sisi kredit.

4. Akuntansi Persediaan OPD

Terdapat dua metode pencatatan persediaan, yaitu:

a. Metode Periodik

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

b. Metode Perpetual

Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifatnya *continues*, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa : obat – obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/ setengah jadi, tanah/ bangunan/ barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

5. Akuntansi Aset Tetap OPD

Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan hal – hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/ donasi, atau lainnya

b. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap. Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah.

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (*overstated*).

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap tersebut.

6. Akuntansi Aset Lainnya OPD

Aset lainnya pada OPD dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Aset Tidak Berwujud

b. Aset Lain – Lain

c. Akumulasi Amortisasi

7. Akuntansi Kewajiban OPD

Ketika OPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan menangguhkan pembayarannya, maka PPK – OPD akan mengakui adanya hutang/ kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat “Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debit dan “Utang” pada sisi kredit.

8. Akuntansi Ekuitas OPD

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan OPD, setelah menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun – akun nominal dengan tujuan:

- 1) Menghitung jumlah surplus/ defisit dari akun pendapatan LO dan beban.
- 2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya.
- 3) Menghitung ekuitas akhir periode.

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode – periode sebelumnya.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (lihat Bagian pertama)
2. Neraca (lihat Bagian kedua)
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing – masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

1. Pendapatan

1) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/ jasa. Selain itu transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada Tahun 2017 Pendapatan – LO BKD dan PSDM direalisasikan sebesar Rp. 0,00. Dalam penjelasan Pendapatan Laporan Operasional Tahun 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2017
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00
3	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00
Jumlah		0,00

Pendapatan yang diterima Oleh BKD dan PSDM hanya Pendapatan asli Daerah senilai Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2017 direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau naik sebesar Rp. 0,00 (0.00%). Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Realisasi 2017
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
4.	Lain – lain PAD yang Sah	0,00
Jumlah		0,00

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Asli Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2017, dengan kenaikan tertinggi ada pada Lain – lain PAD yang Sah dengan kenaikan Rp. 0,00 atau 0.00%.

2) Pendapatan LRA

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM

Pada Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Daerah BKD dan PSDM dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0.00 % dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari :

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi TA 2017	(%)		Realisasi TA 2016
		(Unaudited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
2 Pendapatan transfer	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
3 Lain - lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah (*melampaui/ tidak mencapai*) target sebesar Rp. 0,00 (0.00%). Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017, maka realisasi Tahun Anggaran 2017 lebih tinggi/ rendah 0.00 % atau Rp.0,00

2. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/ amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2017 Beban BKD dan PSDM adalah sebesar Rp. 0,00. Dalam penjelasan beban ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi beban tahun sebelumnya, karena pada Laporan Keuangan tahun sebelumnya yakni tahun 2016 telah menyajikan Laporan Operasional.

1) Beban Pegawai

Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,00. Beban pegawai selama tahun 2017 adalah beban operasional aktivitas BKD dan PSDM pegawai dalam melakukan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

2) Beban Barang Dan Jasa

Beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 0,00. Beban barang dan Jasa selama tahun 2017 adalah beban operasional aktivitas BKD dan PSDM dalam bentuk barang dan jasa dalam melakukan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

3) Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2017
I	Beban Penyusutan	0,00
1.	Peralatan dan mesin	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM

2.	Gedung dan bangunan	0,00
3.	Jalan, irigasi, dan jaringan	0,00
4.	Aset tetap lainnya	0,00
II.	Amortisasi	0,00
1.	Aset tak berwujud	0,00
Jumlah		0,00

4) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,00. Berikut adalah rincian Beban Penyisihan Piutang :

No	Uraian	Realisasi 2017
I	Beban Penyisihan Piutang pendapatan	0,00
1.	Piutang Pajak	0,00
2.	Piutang Retribusi	0,00
3.	Lain – lain PAD Yang Sah	0,00
II.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00
Jumlah		0,00

SURPLUS/ DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2017, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp.0,00 dan realisasi beban Rp. 0,00 maka BKD dan PSDM Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengalami Surplus/ Defisit sebesar Rp. 0,00.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja dibagi sesuai sifatnya menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam konsep ini belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung dengan adanya program atau kegiatan yang direncanakan sedangkan Belanja Tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

Realisasi belanja sampai akhir tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 11.907.783.190,00** atau **78,31 %** dari anggaran sebesar **Rp. 15.205.941.371,00**. Rincian belanja sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
			Angg	Total
Belanja Operasi	14.326.645.871,00	11.105.537.590,00	77,52	73,03
Belanja Modal	879.295.500,00	802.245.600,00	91,24	5,28
Jumlah	15.205.941.371,00	11.907.783.190,00	78,31	21,69

1) Belanja Operasi

Rp. 11.105.537.590,00

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp. **11.105.537.590,00** atau **77,52 %** dari anggaran sebesar Rp. 14.326.645.871,00 Persentase belanja operasi mencapai **73,03 %** dari total belanja.

Rincian belanja operasi sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja pegawai	4.504.498.871,00	3.434.632.601,00	76,25	23,97
Belanja barang	9.822.147.000,00	7.670.904.989,00	78,10	53,54
Jumlah	14.326.645.871,00	11.105.537.590,00	77,52	46,46

a. Belanja Pegawai

Rp. 3.434.632.601,00

Belanja Pegawai adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada Pemerintah Daerah. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp. **3.434.632.601,00** atau 76,25 % dari anggaran sebesar Rp. 4.504.498.871,00.

Persentase belanja pegawai mencapai 23,97 % dari total belanja operasi sebesar Rp. 14.326.645.871,00. Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Gaji dan tunjangan	2.728.518.871,00	2.187.982.601,00	80,19	48,57
Tambahan penghasilan PNS	1.108.380.000,00	929.450.000,00	83,86	20,63
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	256.600.000,00	150.200.000,00	58,53	3,38
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	6.400.000,00	5.400.000,00	84,38	0,12
Honorarium PNS lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	153.600.000,00	153.600.000,00	100,00	3,41
Honorarium non PNS lainnya	191.000.000,00	8.000.000,00	4,19	0,18
Jumlah	4.504.498.871,00	3.434.632.601,00	76,25,00	23,75

b. Belanja Barang

Rp. 7.670.904.989,00

Belanja Barang adalah Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk barang – barang pakai habis dan jasa pihak ketiga dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap. Realisasi belanja barang tahun anggaran 2017 sebesar Rp. **7.670.904.989,00** atau 78,10 % dari anggaran yang sebesar Rp. 9.822.147.000,00. Persentase belanja barang mencapai 53,54 % dari total belanja operasi sebesar Rp. 14.326.645.871,00. Rincian belanja barang sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% dari	
			Angg	Total
Belanja alat tulis kantor	104.399.000,00	89.264.050,00	85,50	0,91
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery, kering)	17.225.000,00	16.420.000,00	95,33	0,17
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	20.000.000,00	19.780.000,00	98,90	0,20
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00	0,06
Belanja bahan bakar minyak/ gas	54.854.000,00	51.480.000,00	93,85	0,52
Belanja bahan baku bangunan	44.720.000,00	43.920.000,00	98,21	0,45
Belanja listrik	21.600.000,00	21.195.016,00	98,13	0,22
Belanja surat kabar/ majalah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ tv kabel/ tv satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,02
Belanja paket/ pengiriman	11.140.000,00	3.000.000,00	26,93	0,03
Belanja sertifikasi	3.300.000,00	1.350.000,00	40,91	0,01
Belanja jasa dekorasi	11.400.000,00	4.400.000,00	38,60	0,04
Belanja jasa dokumentasi dan publikasi	19.000.000,00	5.700.000,00	30,00	0,06
Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja jasa service	15.000.000,00	14.685.730,00	97,90	0,15
Belanja penggantian suku cadang	148.200.000,00	112.774.780,00	76,10	1,15
Belanja pajak kendaraan bermotor	23.848.000,00	12.225.500,00	51,26	0,12

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% dari	
			Angg	Total
Belanja bea balik nama kendaraan bermotor	71.000.000,00	68.645.000,00	96,68	0,70
Belanja STNK	28.900.000,00	4.200.000,00	14,53	0,04
Belanja cetak	16.235.000,00	13.541.500,00	83,41	0,14
Belanja penggandaan	43.800.000,00	43.400.000,00	99,09	0,44
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat	123.600.000,00	75.487.500,00	61,07	0,77
Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan	28.000.000,00	26.400.000,00	94,29	0,27
Belanja sewa sarana mobilitas darat	25.000.000,00	8.300.000,00	33,20	0,08
Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minum rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,06
Belanja makanan dan minum tamu	20.046.000,00	20.000.000,00	99,77	0,20
Belanja makanan dan minuman kegiatan	353.350.000,00	214.930.000,00	60,83	2,19
Belanja pakaian dinas harian (PDH)	60.475.000,00	60.475.000,00	100,00	0,62
Belanja pakaian olahraga	29.050.000,00	29.050.000,00	100,00	0,03
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	425.200.000,00	385.000.000,00	90,55	3,92
Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.022.300.000,00	3.205.915.913,00	79,70	32,64
Belanja beasiswa tugas belajar D3	486.000.000,00	142.000.000,00	29,22	1,45
Belanja beasiswa tugas belajar S1	2.120.000.000,00	1.993.250.000,00	94,02	20,29
Belanja beasiswa tugas belajar S2	270.000.000,00	150.000.000,00	55,56	1,53
Belanja beasiswa ikatan dinas D4/ S1	835.000.000,00	542.145.000,00	64,93	5,52
Belanja kursus - kursus singkat/ pelatihan	69.000.000,00	44.255.000,00	64,14	0,45
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0,05
Belanja penunjang penyelenggaraan pendidikan	200.745.000,00	162.275.000,00	80,84	1,65
Honorarium non PNS lainnya	15.120.000,00	11.000.000,00	72,75	0,11
Honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber PNS	58.200.000,00	55.500.000,00	95,36	0,57
Jumlah	9.822.147.000,00	7.670.904.989,00	78,10	21,90

2) **Belanja Modal**

Rp. 802.245.600,00

Belanja Modal adalah pengeluaran BKD dan PSDM yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat umum.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Secara keseluruhan realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp. **802.245.600,00** atau telah mencapai 91,24 % dari total anggarannya sebesar Rp. 879.295.500,00. Hal ini belum sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel disebabkan belanja modal yang dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga belum terealisasi sepenuhnya. Adapun rincian belanja modal sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Roda - Mobil Jabatan Roda Empat (4)	409.445.500,00	389.245.600,00	95,07	44,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas Operasional - Bermotor Roda Dua (2)	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00	12,96
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,68

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Pengadaan Alat Pembersih – Mesin Babat				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin - Air Conditioner (AC)	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	2,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya – Televisi LCD/ LED + Kabel HDMI	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	2,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer – Laptop	107.500.000,00	50.700.000,00	47,16	5,77
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer – PC. Unit/ Komputer PC	52.950.000,00	52.950.000,00	100,00	6,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Peralatan Cetak – Printer	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	0,78
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Bantu Keamanan – CCTV	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,57
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pegambilan Irigasi – Sumur Bor dan Pompa	25.000.000,00	24.950.000,00	99,80	2,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair – Meja Kerja Lokal	92.000.000,00	92.000.000,00	100,00	10,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair – Kursi Besi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	1,71
Jumlah	879.295.500,00	802.245.600,00	91,24	8,76

SURPLUS/ DEFISIT

Karena BKD dan PSDM Kabupaten tidak menghasilkan pendapatan dalam tahun 2016 dan belanja tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 0,00, maka BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel mengalami defisit sebesar Rp. (11.907.783.190,00). Apabila dibandingkan dengan realisasi defisit tahun anggaran 2016 sebesar Rp. (14.695.848.576,00) maka terdapat penurunan sebesar (Rp. 2.788.065.386,00).

4. Aset

1) Kas di Bendahara Penerimaan **Rp. 0,00**

Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo kas atas penerimaan daerah pada BKD dan PSDM yang telah diterima oleh bendahara penerimaan tetapi belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Atas saldo tersebut bendahara penerimaan telah melakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp. 0,00 pada tanggal 31 Desember 2017

2) Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Saldo yang belum dipertanggung jawabkan sampai dengan 31 Desember 2017, dengan rincian :

- Kas di bendahara pengeluaran Rp.0,00
Per 1 Januari 2017
- Ditambah kas di bendahara pengeluaran Rp. 0,00
Per 31 Desember 2017
- Jumlah** **Rp. 0,00**
- Saldo Definitif Kas di bendahara Rp. 0,00
pengeluaran Per 31 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 tersebut merupakan saldo R/ K Bank Papua, Nomor Rekening : **403.21.10.06.00024 – 7** atas nama OPD BKD dan DIKLAT sebesar Rp. Nihil ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran sesuai Buku Kas Umum per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00

3) Piutang Pajak Rp 0,00

Piutang Pajak sebesar Rp. 0,00 adalah nilai pendapatan Pajak Daerah yang telah ditetapkan/ diakui pada tahun 2017 namun belum terdapat penerimaannya dalam kas daerah sampai dengan 31 Desember 2017.

4) Piutang Retribusi Rp. 0,00

Piutang Retribusi sebesar Rp.0,00 adalah nilai pendapatan Pajak Retribusi yang telah diakui pada tahun 2016 namun belum terdapat penerimaannya dalam kas daerah sampai dengan 31 Desember 2017.

5) Persediaan Rp. 6.638.200,00

Saldo Persediaan Nihil tersebut merupakan persediaan yang ada di BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel per 31 Desember 2017 (Dilampirkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Stok Opname dapat dilihat pada Lampiran I). Persediaan ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel.

6) Aset Tetap Rp. 802.245.600,00

Aset Tetap BKD dan PSDM Per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **802.245.600,00** tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2016 ditambah mutasi Aset Tetap Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah		
	31 Des 2016	Mutasi 2017	31 Des 2017
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.366.043.822,00	777.295.600,00	3.143.339.422,00
Gedung dan Bangunan	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Sub - Jumlah Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku Aset Tetap	2.366.043.822,00	802.245.600,00	3.168.289.422,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Seluruh Aset Tetap	2.366.043.822,00	802.245.600,00	3.168.289.422,00

Jumlah aset tetap tersebut di atas adalah hasil pengadaan selama tahun 2017 ditambah aset hasil pendataan sampai dengan 31 Desember 2016 (lihat Lampiran II).

7) Aset Lainnya Rp. 3.177.592.665,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah Rp. 3.177.592.665,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 senilai Rp. 3.177.592.665,00, terdiri atas

Uraian	Jumlah		
	2017	2016	Kenaikan/penurunan
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
Aset Lain – lain	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM

Uraian	Jumlah		
	2017	2016	Kenaikan/ penurunan
Kas Bendahara Pengeluaran yang Belum dipertanggungjawabkan T.A 2010	3.177.592.665,00	3.177.592.665,00	0,00
Jumlah Seluruh Aset Lainnya	3.177.592.665,00	3.177.592.665,00	0,00

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rp. 0,00
 Tagihan Piutang penjualan angsuran merupakan tagihan piutang penjualan angsuran yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2017.
- b. Aset Lain – lain Rp. 0,00
 Aset lain – lain adalah merupakan akun aset untuk menampung aset yang tidak bisa dikelompokkan dalam pos – pos aset lainnya.
- c. Kas Bendahara yang belum Dipertanggungjawabkan Rp. 3.177.592.665,00
 Kas Bendahara Tahun Anggaran yang belum dipertanggungjawabkan merupakan sisa kas di bendahara pengeluaran Tahun 2010 pada BKD dan PSDM berupa bukti – bukti kelengkapan SPJ yang menjadi temuan tindak lanjut BPK – RI Perwakilan Provinsi Papua dari total Rp. 5.418.260.890,00 dan telah di verifikasi BPKAD dan Inspektorat sebesar Rp. 2.240.668.225,00 sampai dengan 31 Desember 2017.

5. Kewajiban

- 1) Kewajiban Jangka Pendek Rp. 0,00
 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 adalah -.

6. Ekuitas Dana

1) Ekuitas Dana Lancar

- (1) SiLPA (SiKPA) Rp. (3.298.158.181,00)

Saldo tersebut merupakan defisit sebesar Rp. (3.298.158.181,00) yang terjadi karena BKD dan PSDM merupakan entitas *cost center* (hanya mengeluarkan belanja tanpa ada pendapatan) dan tidak menyajikan pembiayaan sehingga LRA – nya setiap tahun menunjukkan adanya defisit.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Defisit sesuai dengan LRA	(3.298.158.181,00)
Jumlah SiKPA		(3.298.158.181,00)

- (2) Cadangan untuk Piutang Rp. 0,00
 Saldo Cadangan untuk Piutang per 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,00 karena tidak ada saldo - saldo piutang dalam kelompok Aset Lancar.
- (3) Cadangan untuk Persediaan Rp. 0,00
 Saldo Cadangan untuk Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 tersebut terbentuk karena adanya saldo persediaan berupa stok opname yang akan digunakan dalam kegiatan pada periode berikutnya telah habis terpakai.
- (4) Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Rp. 0,00

Saldo Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek per 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,00.

(5) Pendapatan yang Ditangguhkan **Rp. 0,00**

Pendapatan yang ditangguhkan adalah kekayaan bersih BKD dan PSDM per 31 Desember 2017 yang tertanam pada akas bendahara penerimaan sebesar Rp. 0,00.

2) Ekuitas Dana Investasi **Rp. 0,00**

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 tersebut berkaitan dengan adanya saldo – saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam kelompok Aset selain Aset Lancar dan Dana Cadangan yang terdiri atas sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0,00
2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		0,00

3) R/ K PPKD **Rp. 0,00**

Saldo R/ K PPKD per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 merupakan saldo hubungan rekening koran yang sifatnya hutang piutang dengan BUD seperti hubungan kantor pusat dan cabang pada akuntansi komersial.

7. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

1) Ekuitas Awal

Ekuitas Awal BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,00. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2017.

2) Surplus Defisit (LO)

Surplus Defisit (LO) BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,00 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/ Defisit LO.

3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 merupakan koreksi – koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas pada tahun 2017. Koreksi – koreksi tersebut yaitu sebesar (Rp. 0) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Akumulasi Penyusutan Rp. 0,00
- b. Akumulasi Amortisasi Rp. 0,00
- c. Penyisihan Piutang Rp. 0,00
- d. Koreksi Aset Tetap Rp. 0,00
- e. Lain – lain Rp. 0,00

4) Ekuitas Akhir

**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
BKD DAN PSDM**

Ekuitas Akhir BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.0 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,00 atau naik 0,00 %.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI
NON – KEUANGAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : **44** Tahun 2016 Tanggal : 29 September 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) maka nomenklatur BKD dan DIKLAT berubah sehingga susunan organisasi baru yaitu terdiri dari :

- A. Kepala BKD dan PSDM
- B. Sekretaris
 - 1. Sekretaris, membawahi :
 - a) Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbag Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Bidang Kepegawaian membawahi :
 - a) Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pengembangan Karir;
 - b) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun;
 - c) Sub Bidang Pengendalian Informasi, Dokumentasi dan Kinerja.
 - 3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Ikatan Dinas;
 - 4. UPTB
 - 5. Kelompok Jabatan fungsional

BAB VII P E N U T U P

Berdasarkan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 dan uraian pada bab – bab di atas mengenai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan OPD BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan realisasi belanja sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. **11.907.783.190,00** atau 78,31 % dari yang dianggarkan Rp. 15.205.941.371,00 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 14.326.645.871,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 879.295.500,00
3. Gambaran Neraca BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel per 31 Desember 2017 adalah Total Aset sebesar **Rp. 802.245.600,00**. Total Kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Total Ekuitas Dana sebesar Rp. **3.298.158.181,00** Total Aset merupakan gambaran kekayaan BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel per 31 Desember 2017 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 6.638.200,00, Aset Tetap sebesar **Rp. 802.245.600,00,00** dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00. Aset tersebut bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek Rp. 3.177.592.665,00 Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. **3.298.158.181,00**, Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0,00 dan Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi sebesar Rp. 0,00.
4. Untuk Aset Tetap BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel khususnya, ke depannya akan dilakukan perbaikan – perbaikan kembali (*Adjustment*) ke tahun buku berikutnya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Sesuai dengan angka – angka realisasi dan penjelasan secara garis besar diatas, maka pelaksanaan Program dan Kegiatan pada BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 pada umumnya berjalan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggung jawaban anggaran yang telah ditetapkan.

Namun perlu dipahami, di samping hasil – hasil yang telah dicapai, masih terdapat juga kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas – tugas yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita semua dalam rangka membangun Kota Tanah Merah yang kita cintai ini, sekarang dan selamanya.



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BKD DAN PSDM

LAPORAN KEUANGAN

2017
